

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Agency theory* (Teori Agensi)

Agency theory yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling pada 1976 menjelaskan relasi kontraktual antara pemilik perusahaan (*principal*) serta pihak pengelola (*agent*). Teori ini berangkat dari asumsi bahwa baik *principal* maupun *agent* cenderung bertindak untuk kepentingannya sendiri (*self-interest*). Ketika tujuan kedua pihak tidak berada pada jalur yang sama, gesekan kepentingan pun menjadi tidak terhindarkan (Jensen & Meckling, 1976).

Masalah utama yang sering muncul dalam hubungan ini adalah ketidakseimbangan informasi antara manajemen dan pemegang saham (Amosh & Khatib, 2022). Kondisi ini timbul karena manajemen mempunyai pengetahuan yang lebih luas tentang operasional, keadaan internal, serta prospek perusahaan daripada pihak pemegang saham. Dalam situasi ini, manajemen berpotensi untuk mengendalikan informasi yang diungkapkan kepada pihak di luar perusahaan, termasuk dalam hal pengungkapan informasi perusahaan (Amosh & Khatib, 2022). Untuk mengatasi hal tersebut, timbul apa yang dikenal sebagai biaya keagenan (*agency cost*). Biaya ini ditanggung oleh prinsipal untuk menjalankan fungsi pengawasan (*monitoring*), serta biaya lain yang muncul dari upaya

manajemen untuk menunjukkan bahwa mereka telah bertindak jujur (*bonding cost*) (Jensen & Meckling, 1976).

Dalam penelitian ini, teori agensi digunakan untuk menerangkan peran *corporate governance* dalam meminimalkan konflik yang muncul antara *principal* dan *agent* (Barros *et al.*, 2020 dalam Fajriati & Hapsari, 2026). Penggunaan variabel *Board Size* dan *Board Independence* dipandang sebagai sarana pengawasan eksternal di dalam struktur dewan untuk memastikan manajemen tidak semata-mata difokuskan kepada pencapaian kinerja keuangan jangka pendek, melainkan memperhatikan pula keberlangsungan perusahaan pada jangka panjang (Menicucci & Paolucci, 2025). Sementara itu, *Managerial Ownership* berperan untuk menyelaraskan kepentingan (*alignment of interest*), di mana manajer yang turut memiliki saham akan ikut menanggung konsekuensi ekonomi dari keputusan yang dibuat, sehingga terdorong untuk bertindak lebih transparan (Darmayanti, 2023).

Terkait dengan pengungkapan lingkungan, *Environmental Disclosure* dapat dipandang seperti media agar memperkecil kesenjangan informasi antara manajemen dan pihak eksternal perusahaan (Wei *et al.*, 2024). Bagi perusahaan sektor energi yang aktivitas operasionalnya memiliki konsekuensi lingkungan yang relatif besar, penyampaian informasi mengenai pengelolaan lingkungan menjadi penting untuk mengoptimalkan kepercayaan pemangku saham, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya. Melalui pengungkapan tersebut, perusahaan mampu

menunjukkan bahwa risiko lingkungan yang dihadapi telah dikelola secara memadai serta bahwa aktivitas operasional dijalankan selaras dengan prinsip tata kelola yang baik (Kakogiannis *et al.*, 2023).

2.1.2 *Environmental Disclosure*

Environmental Disclosure merupakan wujud keterbukaan informasi yang berhubungan dengan kegiatan, akibat, dan upaya pengendalian lingkungan hidup sebagai wujud akuntabilitas sosial dan ekologis. Berthelot *et al.* (2003) mendefinisikannya sebagai seperangkat informasi yang berkaitan dengan berbagai upaya pengelolaan lingkungan yang pernah dilaksanakan perusahaan, kini, juga yang diagendakan di masa depan. Sementara Cormier & Magnan, (2003) menegaskan bahwa pengungkapan ini merupakan bagian dari strategi pelaporan sukarela yang dipengaruhi oleh tekanan institusional serta pertimbangan biaya dan manfaat dari pengungkapan itu sendiri.

Penting untuk membedakan *Environmental Disclosure* dari konsep pelaporan non-finansial lainnya. *Sustainability disclosure* mencakup tiga dimensi sekaligus, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan, sedangkan *CSR disclosure* lebih menekankan tanggung jawab sosial perusahaan secara keseluruhan kepada masyarakat. *Environmental Disclosure* bersifat lebih spesifik karena berfokus pada informasi dampak ekologis, penggunaan sumber daya alam, pengelolaan emisi, dan kepatuhan terhadap standar lingkungan (Clarkson *et al.*, 2008). Dengan melihat berbagai perspektif tersebut, *Environmental Disclosure* dalam

penelitian ini didefinisikan sebagai penyajian informasi yang dilakukan perusahaan secara sukarela maupun wajib mengenai aktivitas, kinerja, dan strategi pengelolaan lingkungan hidup, sebagai bentuk akuntabilitas atas eksternalitas lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan operasionalnya.

Tujuan utama *Environmental Disclosure* adalah menciptakan transparansi antara perusahaan dan pemangku kepentingannya terkait dampak lingkungan dari operasional bisnis. GRI (2021) menegaskan bahwa pengungkapan lingkungan yang berkualitas memungkinkan investor, kreditor, regulator, dan masyarakat untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi. Sebagai media penyampaian informasi kepada investor, *Environmental Disclosure* menjalankan fungsi *signaling* yang menunjukkan bahwa manajemen berorientasi jangka panjang dan mampu mengelola risiko lingkungan (Healy & Palepu, 2000). Bagi perusahaan, manfaat yang diperoleh bersifat reputasional, operasional, sekaligus strategis, karena kepatuhan terhadap standar pengungkapan lingkungan internasional memperluas akses ke pasar modal global yang semakin mengintegrasikan kriteria ESG dalam alokasi aset (Cormier & Magnan, 2003).

Berdasarkan cara pandang teori agensi, *Environmental Disclosure* berperan sebagai mekanisme untuk mengurangi asimetri informasi sekaligus menekan biaya keagenan. Dengan mempublikasikan kinerja dan kebijakan lingkungan secara periodik, manajemen mempersempit kesenjangan informasi antara *agent* dan *principal* sehingga pemantauan

dapat berjalan lebih efektif tanpa biaya monitoring yang melampaui batas (Cormier & Magnan, 2003). Relevansi *agency theory* semakin menonjol pada perusahaan sektor energi yang secara hakiki menghasilkan pengaruh lingkungan signifikan, diawali dari emisi gas rumah kaca hingga risiko pencemaran ekosistem. Pemegang saham perusahaan energi menghadapi risiko informasi yang lebih tinggi dibandingkan sektor lain, sehingga *Environmental Disclosure* yang komprehensif menjadi instrumen esensial agar *principal* dapat membuat keputusan investasi yang berbasis data yang akurat (Clarkson et al., 2008; Jensen & Meckling, 1976).

Informasi lingkungan memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari informasi keuangan konvensional. Pertama, bersifat multidimensional, mencakup aspek konsumsi energi dan air, emisi udara, pengelolaan limbah, serta kepatuhan regulasi lingkungan. Kedua, memiliki dimensi kuantitatif sekaligus kualitatif berupa data terukur dan informasi deskriptif mengenai kebijakan lingkungan perusahaan. Ketiga, bersifat *forward-looking* karena tidak hanya melaporkan kinerja masa lalu tetapi juga menyampaikan komitmen dan target ke depan, sehingga relevan bagi investor yang mempertimbangkan risiko transisi energi. Keempat, sebagian besar bersifat sukarela sehingga kualitas dan kelengkapannya sangat bervariasi antar perusahaan tergantung pada insentif masing-masing (Berthelot et al., 2003). Kelima, memiliki sifat material yang semakin diakui komunitas investasi global, terutama dalam

konteks risiko perubahan iklim yang berdampak langsung pada nilai aset perusahaan di sektor berkarbon tinggi (GRI, 2021).

Perkembangan standar pengungkapan lingkungan internasional dimulai secara masif pada akhir 1990-an, dipicu oleh semakin tingginya perhatian dunia terhadap tantangan perubahan iklim dan keterbatasan laporan keuangan konvensional dalam merefleksikan risiko lingkungan. *Global Reporting Initiative* (GRI), yang didirikan pada 1997 atas inisiatif Ceres dan UNEP, menjadi standar pelaporan keberlanjutan yang paling banyak diadopsi secara global. *GRI Standards* yang berlaku saat ini terdiri atas *Universal Standards* (GRI 1, GRI 2, dan GRI 3), *Sector Standards*, serta *Topic Standards* yang mencakup aspek ekonomi (seri 200), lingkungan (seri 300), serta sosial (seri 400). Dalam penelitian ini, pengukuran *Environmental Disclosure* mengacu pada *Topic Standards* seri 300. Keunggulan *GRI Standards* terletak pada pendekatan berbasis materialitas dan komparabilitas lintas sektor, sehingga memungkinkan perbandingan kinerja lingkungan antar perusahaan secara terstandar (GRI, 2021). Pada level regulasi nasional, OJK menerbitkan SEOJK Nomor 16/SEOJK.04/2021 mengenai Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, yang mewajibkan Laporan Keberlanjutan sebagai bagian terpadu dari Laporan Tahunan dan harus memuat kinerja ekonomi, sosial, serta lingkungan hidup perusahaan (OJK, 2021).

Dalam penelitian ini, *Environmental Disclosure* diukur menggunakan *Environmental Disclosure Index* (EDI) yang dikembangkan

dengan mengacu pada instrumen pengungkapan lingkungan yang digunakan oleh Amalia *et al.* (2022) serta disesuaikan dengan aspek kinerja lingkungan hidup dalam SEOJK Nomor 16/SEOJK.04/2021 serta indikator lingkungan pada GRI Standards, yaitu GRI 301 (*Materials*), GRI 302 (*Energy*), GRI 303 (*Water and Effluents*), GRI 304 (*Biodiversity*), GRI 305 (*Emissions*), GRI 306 (*Waste*), dan GRI 307 (*Environmental Compliance*). Indeks ini terdiri atas 10 item pengungkapan lingkungan yang mencakup kebijakan, komitmen dan target lingkungan, material dan material daur ulang, konsumsi dan efisiensi energi, energi terbarukan, pengelolaan air dan air limbah, emisi gas rumah kaca, pengelolaan limbah B3 dan non-B3, kepatuhan lingkungan dan sanksi, keanekaragaman hayati, serta pengendalian pencemaran udara, tanah dan air. Pengukuran dilakukan menggunakan metode *content analysis* dengan pendekatan *unweighted dichotomous index*, yaitu pemberian skor 1 apabila perusahaan mengungkapkan informasi terkait suatu item lingkungan secara eksplisit pada laporan tahunan dan/ataupun laporan keberlanjutan, baik dalam wujud naratif, kuantitatif, maupun kombinasi keduanya, serta skor 0 jika item tersebut tidak diungkapkan (Amalia *et al.*, 2022). Nilai *Environmental Disclosure Index* (EDI) dihitung dengan membagi jumlah item yang diungkapkan oleh perusahaan dengan total item pengungkapan lingkungan.

Secara konseptual, praktik ini sangat erat kaitannya dengan teori agensi. Pengungkapan informasi yang lebih transparan memungkinkan

pemegang saham untuk melakukan monitoring terhadap aktivitas manajemen secara lebih efektif, sehingga dapat menekan potensi konflik kepentingan dan menurunkan biaya keagenan (*agency cost*) (Aly *et al.*, 2024).

2.1.3 Board Size

Board Size mencerminkan jumlah individu yang menduduki posisi dewan dalam suatu perusahaan (Okoroafor *et al.*, 2026). Dalam konteks sistem hukum perseroan Indonesia yang mengadopsi struktur dua tingkat (*two-tier board system*), organ pengawas tersebut adalah dewan komisaris, yang terpisah secara struktural dari dewan direksi sebagai organ eksekutif. Pemisahan ini membuat fungsi pengawasan dan pelaksanaan menjadi lebih tegas, berbeda dengan negara-negara yang menggunakan sistem satu tingkat (*one-tier board system*).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, dewan komisaris didefinisikan sebagai organ perseroan yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar juga memberikan nasihat kepada direksi (Pasal 108 ayat 1). Lebih lanjut, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014 mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik menegaskan bahwa setiap perusahaan publik wajib mempunyai setidaknya dua anggota dewan komisaris. Ketentuan ini menetapkan batas minimum, sementara batas maksimum tidak ditetapkan secara eksplisit dan diserahkan kepada

kebijakan masing-masing perusahaan sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas usahanya (OJK, 2021).

Dalam kaitannya dengan transparansi perusahaan, dewan komisaris mempunyai tanggung jawab untuk menjamin bahwa informasi material disampaikan dengan akurat serta tepat waktu kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Bertambahnya jumlah anggota dewan berbanding lurus dengan meningkatnya kapasitas pengawasan yang dimiliki, karena lebih banyak anggota yang turut berpartisipasi dalam proses *monitoring* (Giovany, 2021).

Dalam perspektif *agency theory*, *board size* memiliki implikasi ganda terhadap efektivitas pengawasan. Di satu sisi, dewan yang beranggotakan lebih banyak individu cenderung memiliki keberagaman pengalaman, keahlian, dan perspektif yang dapat mendorong peningkatan keterbukaan informasi perusahaan, termasuk dalam pengungkapan informasi lingkungan (Nisa & Wahyuningrum, 2025). Anggota dewan yang beragam latar belakangnya dapat memberikan pengawasan yang lebih menyeluruh terhadap berbagai aspek operasional perusahaan, termasuk praktik pelaporan lingkungan (Chouaibi *et al.*, 2022). Hal ini selaras dengan pendapat bahwa keberagaman di dewan dapat memperkecil asimetri informasi antara manajemen serta pemangku saham (Jensen & Meckling, 1976).

Dalam perusahaan energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, kompleksitas operasional yang tinggi dan tingkat risiko lingkungan yang

besar menjadikan ukuran dewan sebagai variabel yang relevan untuk dikaji. Kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan distribusi energi menuntut pengawasan yang ketat dari sisi regulasi lingkungan, keselamatan kerja, juga tanggung jawab sosial perusahaan (Amalia *et al.*, 2022). Kehadiran dewan yang cukup besar memungkinkan adanya komite-komite khusus, seperti komite audit dan komite risiko, yang berfokus pada pengelolaan isu-isu tersebut secara lebih mendalam (Okoroafor *et al.*, 2026).

2.1.4 Board Independence

Board Independence merujuk pada sejauh mana anggota dewan pengawas bebas dari pengaruh pihak-pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam operasional perusahaan. Independensi ini dianggap penting karena ketiadaan benturan kepentingan memungkinkan anggota dewan untuk menjalankan fungsi pengawasannya secara objektif dan efektif (Ding *et al.*, 2024).

Dalam sistem hukum perusahaan Indonesia, konsep independensi dewan diwujudkan melalui keberadaan komisaris independen. Berlandaskan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, komisaris independen dimaknai sebagai anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik, tidak memiliki saham baik secara langsung juga tidak langsung pada perusahaan tersebut, tidak memiliki afiliasi dengan perusahaan, komisaris, direksi, atau pemegang saham utama, serta tidak memiliki

hubungan usaha yang berkaitan dengan kegiatan emiten (OJK, 2014). Definisi ini mencerminkan prinsip kebebasan dari konflik kepentingan yang menjadi dasar konsep independensi.

Dalam kaitannya dengan perlindungan kepentingan pemegang saham, komisaris independen bertindak sebagai representasi kepentingan pihak-pihak yang tidak mempunyai akses langsung kepada informasi internal perusahaan (Okoroafor *et al.*, 2026). Berlandaskan POJK Nomor 33/POJK.04/2014, komisaris independen memiliki tujuan untuk menyeimbangkan pengambilan keputusan, terkhusus pada rangka perlindungan kepada pemangku saham minoritas serta pihak-pihak lain yang bersangkutan. Oleh karena itu, keberadaan komisaris independen tidak hanya bermanfaat untuk pemangku saham, namun juga untuk pemangku kepentingan yang lebih luas, mencakup kreditur, karyawan, serta masyarakat yang terdampak operasi perusahaan.

Agency theory memberikan kerangka konseptual yang kuat untuk memahami peran board independence dalam tata kelola perusahaan. Dengan tidak adanya afiliasi terhadap manajemen atau pemegang saham pengendali, komisaris independen dapat melakukan penilaian yang lebih kritis dan objektif terhadap keputusan-keputusan manajemen. Kehadiran anggota dewan yang independen dalam jumlah yang signifikan mendorong manajemen untuk bertindak lebih akuntabel, karena mereka menyadari bahwa tindakan mereka diawasi oleh pihak yang tidak memiliki kepentingan untuk melindungi mereka (Okoroafor *et al.*, 2026).

Lebih jauh, Komisaris independen mendorong pengungkapan informasi yang lebih luas serta transparan kepada pemegang saham serta publik, karena mereka memiliki insentif untuk memastikan bahwa pasar dan pemangku kepentingan memperoleh gambaran yang akurat tentang kondisi perusahaan (Chouaibi *et al.*, 2022). Dengan berkurangnya asimetri informasi, biaya keagenan (agency cost) pun dapat ditekan, yang nantinya berpengaruh positif kepada nilai perusahaan dan kepercayaan investor.

Hubungan ini menjadi semakin signifikan dalam konteks perusahaan energi yang beroperasi dalam sektor dengan risiko lingkungan tinggi (Amalia *et al.*, 2022). Desakan dari regulator, investor institusional, serta masyarakat untuk memaparkan informasi lingkungan mendorong kebutuhan akan pengawasan yang independen dan ketat. Komisaris independen pada perusahaan energi diharapkan dapat memastikan bahwa manajemen tidak hanya mematuhi kewajiban pengungkapan minimum, tetapi juga secara proaktif menyampaikan informasi mengenai program pengelolaan lingkungan, risiko iklim, dan target keberlanjutan perusahaan.

2.1.5 *Managerial ownership*

Managerial Ownership atau kepemilikan manajerial mengacu pada porsi kepemilikan saham perusahaan yang berada di tangan pihak manajemen (Purwitasari & Sriyono, 2025). Kepemilikan manajerial umumnya diukur berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh anggota

direksi dan dewan komisaris terhadap jumlah saham beredar perusahaan (Sholikha, 2023). Direksi dan dewan komisaris digunakan sebagai dasar pengukuran karena keduanya merupakan organ penting dalam tata kelola perusahaan. Direksi berperan dalam pengurusan perusahaan, sedangkan dewan komisaris berperan dalam pengawasan terhadap kebijakan direksi (SEOJK, 2021).

Kepemilikan manajerial merupakan bagian dari mekanisme tata kelola perusahaan yang berasal dari internal perusahaan dan berperan dalam memengaruhi pengambilan keputusan oleh manajemen. Teori agensi menjelaskan bahwa pendelegasian wewenang dari pemegang saham kepada manajemen dapat memunculkan konflik karena terdapatnya ketidaksamaan tujuan di antara kedua pihak itu (Sholikha, 2023). Jensen & Meckling (1976) menjelaskan bahwa struktur kepemilikan perusahaan berkaitan dengan *agency costs* dan masalah pemisahan kepemilikan serta pengendalian. Dalam kondisi tersebut, keterlibatan manajemen sebagai pemegang saham dapat mendorong terciptanya kesamaan tujuan dengan pemegang saham. Karena, manfaat maupun risiko yang timbul dari kinerja perusahaan juga akan memengaruhi manajemen sebagai pemilik saham (Wei *et al.*, 2024).

Managerial Ownership dapat dijelaskan melalui dua pandangan, yaitu *alignment effect* dan *entrenchment effect*. *Alignment effect* menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh manajemen dapat mendorong manajemen beraksi sejalan dengan kepentingan pemangku saham.

Manajemen yang mempunyai saham perusahaan mempunyai dorongan untuk meningkatkan nilai perusahaan, menjaga reputasi, dan mengurangi tindakan oportunistik (Wei *et al.*, 2024). Dalam konteks *Environmental Disclosure*, kepemilikan manajerial dapat memicu perusahaan untuk memaparkan informasi lingkungan sebagai wujud transparansi kepada *stakeholder*.

Sebaliknya, *entrenchment effect* menjelaskan bahwa kepemilikan saham yang terlalu besar dapat memperkuat posisi manajemen sehingga pengawasan eksternal menjadi lebih lemah. Dalam kondisi tersebut, manajemen dapat memilih untuk tidak mengungkapkan informasi tertentu apabila informasi tersebut dianggap menimbulkan biaya atau tekanan tambahan bagi perusahaan.

Dalam konteks Indonesia, laporan tahunan emiten ataupun perusahaan publik memuat informasi tentang pemangku saham dan%tase kepemilikan, termasuk anggota direksi serta anggota dewan komisaris yang mempunyai saham. SEOJK Nomor 16/SEOJK.04/2021 juga mengatur bahwa apabila anggota direksi ataupun dewan komisaris tidak mempunyai saham, hal tersebut harus dipaparkan dalam laporan tahunan. Dengan demikian, laporan tahunan menjadi sumber data yang relevan untuk mengukur *managerial ownership*.

2.1.6 Variabel Kontrol

Variabel kontrol merupakan variabel tambahan yang disertakan dalam model penelitian selain variabel utama yang diteliti. Dalam

penelitian ini, variabel kontrol digunakan agar hubungan antara *Board Size*, *Board Independence*, *managerial ownership*, serta *Environmental Disclosure* dapat diuji secara lebih tepat. *Environmental Disclosure* tidak sekadar terpengaruh oleh mekanisme *corporate governance*, namun dapat terpengaruh pula oleh karakteristik keuangan dan skala perusahaan (Nisa & Wahyuningrum, 2025). Oleh karena itu, kajian ini menerapkan *Profitability*, *Firm Size*, serta *Leverage* sebagai variabel kontrol.

2.1.6.1 Profitability

Profitabilitas yakni termasuk ukuran yang umum digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan (Winarko & Jaya, 2018). Konsep ini mengemukakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba lewat penggunaan sumber daya yang dimilikinya selama periode tertentu (Nguyen & Pham, 2026). Dengan kata lain, profitabilitas menunjukkan sejauh mana perusahaan mampu mengelola aset, modal, serta aktivitas operasionalnya untuk memperoleh keuntungan (Shokouhi *et al.*, 2024). Profitabilitas juga mencerminkan efektivitas manajemen dalam menjalankan kegiatan usaha dan mengambil keputusan keuangan yang dapat meningkatkan nilai perusahaan (Ernawati & Widyawati, 2021).

Profitabilitas tidak hanya menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, tetapi juga mencerminkan kapasitas perusahaan untuk mempertahankan keberlangsungan

usaha serta mendukung pertumbuhan jangka panjang (*Pangestuti et al.*, 2022). Profitabilitas dapat diukur melalui hubungan antara laba yang didapatkan dengan sumber daya yang digunakan untuk memperoleh laba itu, seperti aset, ekuitas, maupun penjualan. Oleh karena itu, profitabilitas tidak sekadar dicermati dari besarnya laba yang diperoleh, namun juga dari tingkat efisiensi perusahaan pada memanfaatkan sumber daya yang tersedia (Nisa & Wahyuningrum, 2025; Shokouhi *et al.*, 2024; Wei *et al.*, 2024)

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, profitabilitas pada kajian ini diartikan sebagai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba secara efisien lewat pemanfaatan aset yang dimiliki. Tingkat profitabilitas mencerminkan kualitas pengelolaan perusahaan sekaligus menunjukkan kemampuan perusahaan pada mewujudkan nilai untuk para pemangku kepentingan. Definisi ini relevan digunakan pada perusahaan sektor energi karena karakteristik industri tersebut yang umumnya memiliki kebutuhan investasi aset dalam jumlah besar, sehingga efektivitas penggunaan aset menjadi aspek penting dalam menilai kinerja perusahaan.

Hubungan antara profitabilitas dan pengungkapan informasi perusahaan dapat dikemukakan lewat *agency theory* yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976). Teori ini menjelaskan bahwa terdapat hubungan kontraktual antara pemilik

perusahaan sebagai *principal* dan manajemen sebagai *agent* (Jensen & Meckling, 1976). Pada hubungan itu kerap muncul perbedaan kepentingan karena tiap-tiap pihak mempunyai tujuan yang tidak selalu sejalan (Al-Tuwaijri *et al.*, 2004). Selain itu, posisi manajemen sebagai pengelola perusahaan memberikan akses yang lebih besar terhadap berbagai informasi internal perusahaan. Ketimpangan informasi antara manajemen serta pemangku saham itu dapat meningkatkan potensi timbulnya biaya keagenan (*agency costs*) (Healy & Palepu, 2000).

Dalam kaitannya dengan profitabilitas, *agency theory* menjelaskan bahwa manajemen memiliki dorongan untuk memperlihatkan kinerja yang baik pada pemegang saham serta investor. Tingkat profitabilitas yang tinggi menjadi salah satu indikator kesuksesan manajemen pada mengelola perusahaan. Oleh karena itu, ketika perusahaan mampu menghasilkan laba yang tinggi, manajemen cenderung terdorong untuk menyampaikan informasi yang dapat menguatkan persepsi positif para pemangku kepentingan kepada perusahaan (Healy & Palepu, 2000). Termasuk cara yang dapat dijalankan yakni melalui penyediaan informasi yang lebih luas dan transparan, termasuk informasi mengenai aktivitas lingkungan perusahaan.

Dalam penelitian empiris, profitabilitas dapat diukur menggunakan berbagai rasio keuangan, seperti *Return on assets*

(ROA), *Return on Equity* (ROE), *Return on Investment* (ROI), dan *Net Profit Margin* (NPM). Masing-masing rasio memberikan sudut pandang yang berbeda mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba karena menggunakan dasar pengukuran yang berbeda (Fauzi & Rukmini, 2018).

Return on assets (ROA) merupakan ukuran yang paling lazim digunakan di penelitian-penelitian terkait pengungkapan perusahaan. *Return on assets* (ROA) yakni rasio profitabilitas yang menunjukkan kemampuan perusahaan pada menghasilkan laba dari aset yang dimiliki (Nisa & Wahyuningrum, 2025). ROA mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan total aset untuk menciptakan keuntungan. Semakin tinggi nilai ROA, semakin baik kemampuan perusahaan pada memanfaatkan aset untuk menghasilkan laba.

Dari konteks perusahaan energi, ROA penting karena sektor ini umumnya memiliki karakteristik *asset intensive*, yaitu membutuhkan aset besar untuk kegiatan eksplorasi, produksi, distribusi, pertambangan, pembangkit, atau jasa pendukung energi. Oleh karena itu, tingkat keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba dari asetnya dapat mencerminkan suatu indikator penting untuk melihat kondisi ekonomi perusahaan (Shokouhi *et al.*, 2024).

ROA digunakan sebagai variabel kontrol karena tingkat profitabilitas dapat memengaruhi kemampuan dan motivasi perusahaan dalam melakukan *Environmental Disclosure* (Nisa & Wahyuningrum, 2025). Perusahaan yang mampu menghasilkan tingkat keuntungan yang tinggi umumnya mempunyai kapasitas sumber daya yang lebih memadai untuk menyusun laporan keberlanjutan, mengelola program lingkungan, serta menyajikan informasi lingkungan secara lebih luas (Putra *et al.*, 2025). *Environmental Disclosure* membutuhkan biaya, sistem pelaporan, data lingkungan, dan sumber daya manusia yang memadai. Perusahaan yang lebih menguntungkan dapat lebih mudah memenuhi kebutuhan tersebut.

2.1.6.2 Firm Size

Firm Size atau ukuran perusahaan adalah ukuran yang mengemukakan kecil besarnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset, total penjualan, kapitalisasi pasar, atau jumlah tenaga kerja. Dalam penelitian akuntansi keuangan dan pengungkapan perusahaan, *Firm Size* biasanya diukur menggunakan logaritma natural total aset karena total aset menggambarkan sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan (Tagliatalata *et al.*, 2023; Wei *et al.*, 2024).

Penerapan logaritma natural bertujuan untuk menekan perbedaan skala data yang cukup besar antarperusahaan (Azaro

et al., 2024). Perusahaan energi biasanya memiliki nilai aset yang sangat besar dan bervariasi, sehingga penggunaan logaritma natural dapat membuat data lebih stabil dalam analisis statistik.

Firm Size digunakan sebagai variabel kontrol karena perusahaan dengan skala yang lebih besar umumnya berada dalam perhatian publik yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan berskala kecil (Wei *et al.*, 2024). Perusahaan besar umumnya mempunyai jumlah investor yang lebih banyak, aktivitas operasional yang lebih luas, juga dampak ekonomi serta lingkungan yang lebih besar. Situasi ini memicu perusahaan dengan skala yang lebih besar untuk meningkatkan keterbukaan dalam penyampaian informasi kepada *stakeholder* (Amalia *et al.*, 2022; Taglialatela *et al.*, 2023).

Perusahaan besar mempunyai keperluan lebih tinggi untuk menjaga penerimaan sosial karena aktivitasnya lebih terlihat oleh masyarakat. Lebih lanjut, perusahaan besar juga mempunyai jumlah *stakeholder* yang lebih luas, maka kebutuhan informasi yang harus dipenuhi menjadi lebih besar. Oleh karena itu, *Firm Size* perlu dikendalikan agar pengaruh variabel tata kelola perusahaan terhadap *Environmental Disclosure* tidak bias karena perbedaan skala perusahaan.

2.1.6.3 Leverage

Leverage mencerminkan tingkat penggunaan utang sebagai sumber pendanaan dalam perusahaan. Rasio ini mengemukakan sejauh mana aset perusahaan didukung oleh dana yang berasal dari liabilitas (Anozie *et al.*, 2023). Dalam kajian ini, *Leverage* diproksikan menggunakan Debt to Equity Ratio (DER). DER menunjukkan perbandingan antara total liabilitas dengan total ekuitas perusahaan (Anozie *et al.*, 2023). Nilai DER yang semakin tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan lebih banyak bergantung pada pendanaan berbasis utang daripada pendanaan yang berasal dari modal sendiri.

Leverage digunakan sebagai variabel kontrol karena struktur pendanaan perusahaan dapat memengaruhi tingkat pengungkapan informasi. Perusahaan dengan *Leverage* tinggi mempunyai kewajiban yang lebih besar pada kreditur (Nisa & Wahyuningrum, 2025). Kondisi ini dapat memicu perusahaan untuk memaparkan informasi dengan lebih luas agar kreditur serta investor memperoleh keyakinan bahwa perusahaan mampu mengelola risiko, termasuk risiko lingkungan.

Dalam perspektif teori agensi, *Leverage* dapat meningkatkan kebutuhan pengawasan dari pihak kreditur. Kreditur memerlukan informasi yang cukup untuk menilai risiko perusahaan, mencakup risiko operasional, risiko kepatuhan, serta

risiko lingkungan. (Amalia *et al.*, 2022). *Environmental Disclosure* dapat menjadi salah satu bentuk pengungkapan yang membantu menurunkan asimetri informasi antara perusahaan serta pihak eksternal (Wei *et al.*, 2024).

Dari konteks perusahaan energi, *Leverage* menjadi penting karena kegiatan operasional sektor energi sering membutuhkan pembiayaan besar untuk aset tetap, eksplorasi, produksi, alat berat, infrastruktur, dan proyek jangka panjang (Shokouhi *et al.*, 2024). Perusahaan dengan utang tinggi dapat mengatasi tekanan lebih besar untuk menunjukkan bahwa kegiatan operasionalnya dikelola secara bertanggung jawab. Risiko lingkungan yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan biaya hukum, biaya pemulihan, sanksi, gangguan operasional, dan risiko reputasi (Nisa & Wahyuningrum, 2025). Oleh karena itu, *Leverage* perlu dikendalikan dalam penelitian *Environmental Disclosure*.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut disajikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini.

Chouaibi *et al.* (2022) meneliti hubungan antara karakteristik dewan terhadap *Environmental Disclosure* pada perusahaan-perusahaan di Eropa. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linier berganda terhadap 220 perusahaan pada tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Board Size* dan *Board Independence* berpengaruh positif

signifikan terhadap *Environmental Disclosure*. Selain itu, variabel kontrol seperti *Firm Size* berpengaruh positif signifikan, sedangkan ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap *Environmental Disclosure*.

Penelitian yang dilakukan oleh Amalia *et al.* (2022) bertujuan untuk menganalisis pengaruh struktur dewan terhadap *voluntary Environmental Disclosure* pada perusahaan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode sistem *Generalized Method of Moments* (GMM) pada 356 perusahaan selama periode 2009–2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Board Size* berpengaruh positif signifikan terhadap *Environmental Disclosure*, sedangkan *Board Independence* berpengaruh negatif signifikan. Selain itu, *Leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap *disclosure*, sementara *Firm Size* dan ROA sebagian besar tidak berpengaruh signifikan terhadap *Environmental Disclosure*.

Studi oleh Sari & Fitriani (2023) menganalisis pengaruh karakteristik dewan terhadap *ESG disclosure* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder dari 205 perusahaan selama periode 2018–2022 yang dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Board Independence* dan *Board Size* berpengaruh positif signifikan terhadap *ESG disclosure*, serta beberapa variabel kontrol seperti *Firm Size* dan *Leverage* juga menunjukkan pengaruh negatif.

Riset yang dilakukan oleh Ding *et al.* (2024) menganalisis pengaruh karakteristik dewan terhadap *ESG performance* pada perusahaan yang terdaftar

di China. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi data panel terhadap 1931 perusahaan selama periode 2009–2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Board Independence* berpengaruh positif signifikan terhadap *ESG performance*, sedangkan *Board Size* tidak berpengaruh signifikan. Selain itu, variabel kontrol seperti *Firm Size* dan profitabilitas berpengaruh positif signifikan, sementara *Leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap *ESG performance*.

Penelitian oleh Aly *et al.* (2024) bertujuan untuk menganalisis pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap *Environmental Disclosure* pada perusahaan di Inggris dan Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder dari 321 perusahaan selama periode 2010–2020 yang dianalisis menggunakan metode *dynamic panel regression* (sistem GMM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Board Independence* berpengaruh positif signifikan terhadap *Environmental Disclosure*, sedangkan *Board Size* tidak berpengaruh signifikan. Selain itu, *Firm Size* terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap *Environmental Disclosure*.

Temuan oleh Agnese *et al.* (2024) bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik dewan terhadap kinerja ESG pada perusahaan yang terdaftar di bursa saham Afrika. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel dari 109 perusahaan selama periode 2016–2022 yang dianalisis menggunakan *panel regression*. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa *Board Size* berpengaruh negatif signifikan terhadap *ESG performance*, sedangkan *Board Independence* berpengaruh positif signifikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ezekiel *et al.* (2024) bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik dewan terhadap kualitas pengungkapan emisi karbon yang merupakan bagian dari *Environmental Disclosure* pada perusahaan sektor minyak dan gas di Nigeria. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode *ordered logistic regression*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Board Independence* berpengaruh positif signifikan terhadap *carbon emission disclosure*. Namun, *Board Size* menunjukkan hasil yang tidak konsisten.

Penelitian oleh Menicucci & Paolucci (2025) bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik dewan terhadap kinerja ESG pada perusahaan utilitas di Eropa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel dari 119 perusahaan selama periode 2018–2022 yang dianalisis menggunakan regresi panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Board Size* dan *Board Independence* berpengaruh positif signifikan terhadap *ESG performance*.

Temuan terbaru yang dilakukan oleh Scholtz & Kieviet (2026) bertujuan untuk menganalisis pengaruh struktur tata kelola perusahaan terhadap tingkat pengungkapan ESG pada perusahaan yang terdaftar di Johannesburg Stock Exchange. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel dari 90 perusahaan selama periode 2012–2022 yang dianalisis menggunakan regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Board*

Size memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ESG secara keseluruhan, namun tidak berpengaruh signifikan terhadap *Environmental Disclosure*. Sementara itu, *Board Independence* berpengaruh positif signifikan terhadap seluruh dimensi ESG, termasuk *Environmental Disclosure*.

Lain halnya penelitian oleh Okoroafor *et al.* (2026) bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Board Size* dan *Board Independence* terhadap *Environmental Disclosure* pada perusahaan minyak dan gas di Nigeria dan Ghana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode *robust least squares regression* terhadap 10 perusahaan selama periode 2012–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Board Independence* berpengaruh positif signifikan terhadap *Environmental Disclosure*, sedangkan *Board Size* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Environmental Disclosure*.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu yang telah diuraikan, peneliti merangkum hasil penelitian tersebut dalam bentuk tabel untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis dan memudahkan dalam melakukan perbandingan antar penelitian.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Indrasari & Ardhi (2017)	Mengkaji pengaruh <i>managerial ownership</i> , <i>company size</i> , dan <i>environmental performance</i> pada <i>Corporate Environmental Disclosure</i> dengan <i>financial performance</i> sebagai mediasi	Kuantitatif, 72 perusahaan PROPER (2013–2015), regresi & <i>path analysis</i>	<i>Company size</i> dan <i>financial performance</i> berpengaruh positif; <i>Managerial Ownership</i> dan <i>environmental performance</i> tidak berpengaruh; mediasi <i>financial performance</i> tidak terbukti
2	Anggrarini & Taufiq (2017)	Menguji pengaruh <i>Board Size</i> dan <i>Firm size</i> terhadap <i>Environmental Disclosure</i>	Kuantitatif, 92 perusahaan (2014), regresi linier berganda	<i>Board Size</i> maupun <i>Firm Size</i> tidak terbukti memberikan pengaruh signifikan pada <i>Environmental Disclosure</i>
3	Fuadah et al. (2018)	Mengkaji dampak <i>Board Size</i> , <i>Board Independence</i> , <i>audit committee</i> , dan <i>woman on board</i> terhadap <i>firm value</i> melalui <i>Environmental Disclosure</i> sebagai <i>variabel intervening</i>	Kuantitatif, perusahaan tambang BEI periode 2013-2017, menggunakan model mediasi dengan <i>Environmental Disclosure</i> sebagai variabel <i>intervening</i> .	<i>Board Size</i> dan <i>Board Independence</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Environmental Disclosure</i> . <i>Audit committee</i> , <i>Woman on board</i> , <i>Environmental Disclosure</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Firm value</i> .

No	Penulis	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
4	Kartika & Isnalita (2018)	Menguji pengaruh <i>Board Size</i> , <i>Managerial Ownership</i> dan <i>Profitability</i> terhadap <i>Environmental Disclosure</i> pada website perusahaan.	Kuantitatif, 101 perusahaan manufaktur BEI tahun 2015, purposive sampling, data sekunder dari annual report, analisis regresi linier berganda dengan SPSS.	Board size dan Profitability berpengaruh signifikan positif terhadap <i>Environmental Disclosure</i> , sedangkan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh.
5	Nugraheni et al. (2021)	Menganalisis pengaruh <i>good corporate governance</i> , ukuran perusahaan, dan <i>media exposure</i> terhadap <i>Environmental Disclosure</i> pada perusahaan sektor pertambangan di Indonesia.	Kuantitatif, 60 perusahaan (2015–2019), regresi linier berganda	<i>Audit committee Size</i> berpengaruh positif signifikan. <i>Board Size</i> , <i>Firm Size</i> , dan <i>media exposure</i> tidak signifikan terhadap <i>Environmental Disclosure</i>
6	Chukwu & Nkak (2021)	Menganalisis pengaruh atribut dewan terhadap kualitas <i>Environmental Disclosure</i> perusahaan barang konsumsi di Nigeria.	Kuantitatif, 11 perusahaan <i>consumer goods</i> , periode 2010-2018, <i>ex-post facto</i> , OLS. Pengukuran ED memakai 8 kategori GRI dan <i>skoring dummy</i> .	<i>Board Size</i> dan <i>board diversity</i> berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas <i>Environmental Disclosure</i> , sedangkan <i>Board Independence</i> tidak berpengaruh signifikan.

No	Penulis	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
7	Chouaibi <i>et al.</i> (2022)	Menganalisis pengaruh karakteristik dewan terhadap <i>Environmental Disclosure</i>	Kuantitatif, 220 perusahaan Eropa (2015), regresi linier	<i>Board Size</i> , <i>Board Independence</i> , <i>Firm Size</i> berpengaruh positif signifikan; <i>CEO duality</i> , <i>Audit Committee Independence</i> , <i>Profitability</i> , <i>Executive Compensation</i> tidak berpengaruh signifikan
8	Amalia <i>et al.</i> (2022)	Menganalisis pengaruh struktur dewan terhadap <i>voluntary environmental dan energy disclosure</i>	Kuantitatif, 356 perusahaan (2009–2018), system GMM	<i>Board Size</i> , <i>Leverage</i> berpengaruh positif signifikan; <i>Board Independence</i> berpengaruh negatif signifikan; <i>women on board</i> dan <i>CEO duality</i> tidak berpengaruh signifikan; sedangkan <i>Firm Size</i> , <i>ROA</i> , <i>cash</i> , dan <i>firm age</i> sebagian besar tidak signifikan
9	Taglialatela <i>et al.</i> (2023)	Menganalisis pengaruh karakteristik dewan terhadap dukungan SDGs lingkungan	Kuantitatif, data sekunder (4417 perusahaan global, 2020), regresi logit & <i>fractional</i>	<i>Board Size</i> , <i>Gender diversity</i> , dan <i>Board Independence</i> berpengaruh positif signifikan terhadap dukungan SDGs lingkungan. <i>CEO duality</i> tidak signifikan.

No	Penulis	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
10	Sari & Fitriani (2023)	Menganalisis pengaruh karakteristik dewan terhadap ESG disclosure di Indonesia	Kuantitatif, 205 perusahaan (2018–2022), regresi linier berganda	<i>Board Independence</i> dan <i>Board Size</i> berpengaruh positif signifikan. <i>Gender diversity</i> tidak signifikan. <i>Audit committee independence</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap ESG disclosure
11	Sholikha et al. (2023)	Menguji pengaruh <i>managerial ownership</i> dan <i>firm size</i> terhadap corporate <i>Environmental Disclosure</i> .	Kuantitatif ex-post facto, 10 perusahaan sektor industri dasar dan kimia BEI, periode 2017-2021, data annual report dan <i>Sustainability report</i> , regresi data panel dengan EViews 12; model terpilih REM.	<i>Managerial Ownership</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap corporate <i>Environmental Disclosure</i> , sedangkan <i>Firm Size</i> berpengaruh positif signifikan. Uji simultan juga menunjukkan model tidak signifikan secara bersama-sama.
12	Ding et al. (2024)	Menganalisis pengaruh karakteristik dewan terhadap ESG performance	Kuantitatif, 1931 perusahaan (2009–2022), <i>panel regression</i>	<i>Board Independence</i> , <i>board background</i> , <i>Firm Size</i> dan <i>Profitability</i> berpengaruh positif signifikan; <i>Board Size</i> dan <i>Gender diversity</i> tidak berpengaruh signifikan; <i>Leverage</i>

No	Penulis	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				berpengaruh negatif signifikan
13	Agnese <i>et al.</i> (2024)	Menganalisis pengaruh karakteristik dewan terhadap ESG <i>performance</i> pada perusahaan di Afrika	Kuantitatif, 109 perusahaan (2016–2022), <i>panel regression</i> (POLS & PQR)	<i>Board Size</i> , <i>Board Independence</i> , <i>Gender diversity</i> , <i>board specific skills</i> , <i>CSR committee</i> dan <i>corporate governance committee</i> berpengaruh positif signifikan; <i>CEO duality</i> berpengaruh negatif signifikan; variabel lain menunjukkan hasil yang tidak konsisten
14	Aly <i>et al.</i> (2024)	Menganalisis pengaruh <i>corporate governance</i> terhadap <i>Environmental Disclosure</i> di UK dan US	Kuantitatif, 321 perusahaan (2010–2020), system GMM	<i>Board Independence</i> berpengaruh positif signifikan. <i>Board Size</i> , <i>Gender diversity</i> , dan <i>Audit committee Size</i> tidak signifikan. <i>Board meeting</i> dan <i>audit committee independence</i> berpengaruh negatif pada kondisi tertentu. <i>Firm Size</i> positif signifikan

No	Penulis	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
15	Oyerogba <i>et al.</i> (2024)	Menguji pengaruh karakteristik dewan terhadap carbon emission disclosure	Kuantitatif, <i>ordered logistic regression</i>	<i>Board Independence</i> , structure, <i>Gender diversity</i> , dan <i>ethnic diversity</i> berpengaruh positif signifikan
16	Idris <i>et al.</i> (2024)	Menganalisis pengaruh GCG (<i>Gender diversity, Board Size, Board meeting</i>) terhadap ESG disclosure	Kuantitatif, 78 perusahaan (2023), regresi linier berganda (SPSS)	<i>Board Gender diversity</i> berpengaruh negatif signifikan. <i>Board Size</i> dan <i>Board meeting</i> tidak berpengaruh signifikan.
17	Ning <i>et al.</i> (2024)	Menganalisis pengaruh ESG disclosure terhadap going concern serta peran <i>Managerial Ownership</i> sebagai moderasi	Kuantitatif, 236 perusahaan (2007–2022), panel data (AMG & CCEMG)	ESG disclosure berpengaruh positif signifikan; <i>Managerial Ownership</i> memperkuat hubungan ESG disclosure terhadap going concern; variabel kontrol seperti <i>leverage</i> , profitabilitas, usia, dan ukuran perusahaan turut mempengaruhi model

No	Penulis	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
18	Wei <i>et al.</i> (2024)	Menganalisis pengaruh struktur kepemilikan terhadap <i>environmental information disclosure</i> perusahaan di China	Kuantitatif, data panel, <i>fixed effect regression</i> , 300 perusahaan periode 2009–2019	<i>Managerial Ownership</i> berpengaruh positif; <i>Institutional ownership</i> dan <i>state ownership</i> berpengaruh negatif signifikan; <i>Ownership concentration</i> tidak berpengaruh signifikan; Variabel kontrol <i>Firm Size</i> , <i>Board Size</i> , dan <i>board meeting</i> berpengaruh positif signifikan, sedangkan <i>Leverage</i> berpengaruh negatif signifikan; <i>ROA</i> , <i>Board Independence</i> , <i>CEO duality</i> , dan <i>market-to-book ratio</i> tidak berpengaruh signifikan
19	Menicucci & Paolucci (2025)	Menganalisis pengaruh karakteristik dewan terhadap ESG <i>performance</i>	Pendekatan kuantitatif, analisis regresi data panel (<i>fixed effect</i> , OLS)	<i>Board Size</i> , <i>Board Independence</i> , dan <i>CSR committee</i> berpengaruh positif signifikan; <i>CEO duality</i> negatif signifikan; <i>Gender diversity</i> signifikan jika mencapai <i>critical mass</i>

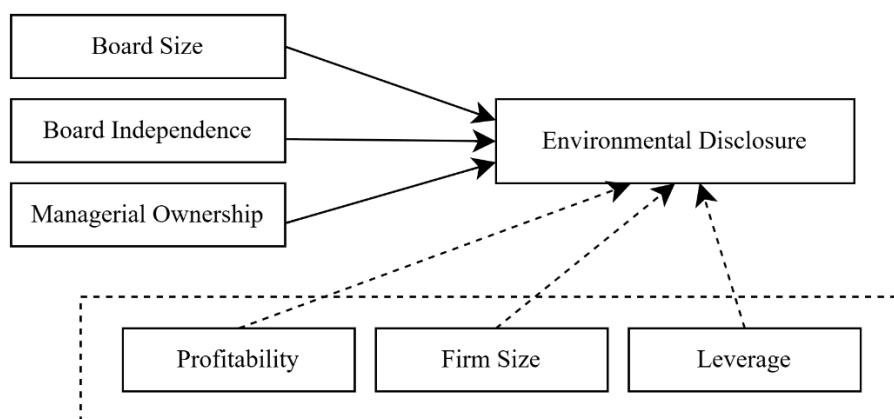
No	Penulis	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
20	Nisa & Wahyuningrum (2025)	Menganalisis pengaruh <i>environmental cost</i> , <i>Board Size</i> , dan <i>institutional ownership</i> terhadap <i>carbon emission disclosure</i> dengan <i>company size</i> sebagai moderasi	Kuantitatif, 32 perusahaan (2021–2024), regresi linier berganda & MRA	<i>Environmental cost</i> berpengaruh positif signifikan; <i>Board Size</i> dan <i>institutional ownership</i> tidak berpengaruh signifikan; <i>company size</i> berpengaruh positif signifikan; <i>company size</i> memoderasi hubungan <i>environmental cost</i> tetapi tidak memoderasi <i>Board Size</i> dan <i>institutional ownership</i> ; ROA dan <i>Leverage</i> tidak signifikan
21	Putra <i>et al.</i> (2025)	Menganalisis pengaruh <i>Profitability</i> , <i>managerial ownership</i> , dan <i>institutional ownership</i> terhadap <i>carbon emission disclosure</i>	Kuantitatif, 20 perusahaan energi (2021–2023), regresi data panel	<i>Profitability</i> dan <i>Managerial Ownership</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>carbon emission disclosure</i> ; <i>institutional ownership</i> tidak berpengaruh signifikan

No	Penulis	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
22	Henriette Elsabe Scholtz & Suzanne Kieviet (2026)	Menganalisis pengaruh struktur tata kelola terhadap ESG disclosure	Kuantitatif, data panel (2012–2022), regresi <i>Fixed Effects & Random Effects</i>	<i>Board Size</i> berpengaruh positif signifikan terhadap ESG, SOC, GOV namun tidak signifikan pada ENV. <i>Board Independence</i> dan frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap seluruh dimensi ESG termasuk ENV. Ukuran komite audit berpengaruh pada ENV dan GOV
23	Okoroafor et al. (2026)	Menganalisis pengaruh <i>Board Size</i> dan <i>Board Independence</i> terhadap <i>Environmental Disclosure</i>	Kuantitatif, 10 perusahaan (2012–2024), <i>robust least squares regression</i>	<i>Board Size</i> tidak berpengaruh signifikan; <i>Board Independence</i> berpengaruh positif signifikan
24	Ratnani et al. (2026)	Menganalisis pengaruh <i>Environmental Performance</i> , <i>Firm Size</i> , <i>Board Gender Diversity</i> , dan <i>Firm Age</i> terhadap kualitas <i>Environmental Disclosure</i> .	Kuantitatif, data panel (61 perusahaan, 2021–2023), regresi panel (EViews)	<i>Environmental Performance</i> dan <i>Firm Size</i> berpengaruh positif signifikan. <i>Board Gender Diversity</i> tidak berpengaruh signifikan. <i>Firm Age</i> berpengaruh positif dengan signifikansi lemah.

Walaupun penelitian-penelitian terdahulu sudah menyumbang kontribusi yang signifikan pada mengidentifikasi berbagai determinan *Environmental Disclosure*, masih ada sejumlah keterbatasan yang mendorong perlunya penelitian lebih lanjut. Pertama, hasil penelitian terkait pengaruh *Board Size* terhadap *Environmental Disclosure* menunjukkan inkonsistensi, di mana beberapa kajian mengungkapkan dampak positif signifikan, adapun kajian lain mengemukakan tidak adanya pengaruh signifikan bahkan cenderung negatif. Kedua, meskipun *Board Independence* umumnya ditemukan berpengaruh positif terhadap *Environmental Disclosure*, terdapat penelitian yang menunjukkan hasil yang berlawanan atau tidak signifikan, sehingga efektivitas independensi dewan dalam meningkatkan transparansi lingkungan masih perlu dikaji lebih lanjut. Ketiga, variabel *Managerial Ownership* belum banyak diteliti secara langsung dalam kaitannya dengan *Environmental Disclosure*, dan hasil penelitian yang ada juga memperlihatkan perolehan yang beragam. Keempat, mayoritas temuan terdahulu menggunakan konteks negara dan sektor yang berbeda, seperti Eropa, Afrika, dan Asia, sehingga hasilnya belum sepenuhnya mencerminkan kondisi perusahaan sektor energi di Indonesia. Selain itu, beberapa penelitian belum memasukkan variabel kontrol seperti profitabilitas (ROA), *Firm Size*, dan *Leverage* secara konsisten, padahal variabel-variabel tersebut berpotensi memengaruhi tingkat *Environmental Disclosure*.

2.3 Kerangka Konseptual

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Model Penelitian



Gambar 2.1 tersebut mencerminkan model konseptual yang menunjukkan pengaruh *Board Size*, *Board Independence*, dan *Managerial Ownership* terhadap *Environmental Disclosure* dengan *Profitability*, *Firm Size*, dan *Leverage* sebagai variabel kontrol. Berikut merupakan penjelasan logika pengaruh antarvariabel berdasarkan kerangka konseptual penelitian.

1. Pengaruh Langsung *Board Size* terhadap *Environmental Disclosure*: Garis panah yang mengarah dari kotak *Board Size* ke kotak *Environmental Disclosure* mengindikasikan adanya pengaruh langsung dari *Board Size* terhadap *Environmental Disclosure*. Logikanya adalah bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris pada perusahaan, semakin besar juga kapasitas pengawasan yang dimiliki perusahaan terhadap kebijakan dan aktivitas manajemen. Pengawasan yang lebih kuat dapat memicu manajemen untuk lebih jujur pada menyampaikan informasi lingkungan.
2. Pengaruh Langsung *Board Independence* terhadap *Environmental Disclosure*: Garis panah yang mengarah dari kotak *Board Independence* ke

kotak *Environmental Disclosure* mengindikasikan adanya pengaruh langsung dari *Board Independence* terhadap *Environmental Disclosure*. Logikanya adalah meningkatnya porsi komisaris independen di dalam susunan dewan komisaris akan memperkuat kapasitas pengawasan yang bersifat objektif terhadap manajemen perusahaan. Komisaris independen diharapkan berperan dalam meminimalkan benturan kepentingan dan meningkatkan transparansi perusahaan karena tidak terikat kepentingan apapun dengan pihak manajemen maupun pemegang saham pengendali.

3. Pengaruh Langsung *Managerial Ownership* terhadap *Environmental Disclosure*: Garis panah yang mengarah dari kotak *Managerial Ownership* ke kotak *Environmental Disclosure* mengindikasikan adanya pengaruh langsung dari *Managerial Ownership* terhadap *Environmental Disclosure*. Logikanya adalah bahwa ketika anggota direksi maupun dewan komisaris turut memiliki kepemilikan saham di perusahaan, peran mereka tidak lagi terbatas sebagai pengelola perusahaan, tetapi juga sebagai pemilik perusahaan. Kondisi tersebut dapat mendorong manajemen untuk lebih memperhatikan keberlanjutan perusahaan dan menjaga reputasi perusahaan dalam jangka panjang. Salah satu wujud nyata dari upaya ini adalah dengan mendorong transparansi perusahaan melalui *Environmental Disclosure*.

4. Peran Profitabilitas, *Firm Size*, dan *Leverage* sebagai Variabel Kontrol: Garis panah yang mengarah dari kotak *Profitabilty*, *Firm Size*, dan *Leverage* ke garis hubungan antara variabel independen utama dan *Environmental Disclosure* menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut tidak menjadi fokus

utama pengujian hipotesis, tetapi digunakan untuk mengendalikan pengaruh karakteristik perusahaan yang juga dapat memengaruhi *Environmental Disclosure*. Logikanya adalah bahwa tingkat *Environmental* bukan semata-mata ditentukan oleh mekanisme *corporate governance*, melainkan turut dipengaruhi pula oleh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan struktur pendanaan. *Profitabilty* digunakan untuk mengendalikan pengaruh profitabilitas perusahaan, karena perusahaan dengan tingkat keuntungan yang lebih tinggi umumnya memiliki sumber daya finansial yang lebih memadai untuk menyelenggarakan pengungkapan lingkungan. *Firm Size* digunakan untuk mengendalikan pengaruh ukuran perusahaan, karena perusahaan yang lebih besar umumnya mempunyai eksposur publik serta tekanan *stakeholder* yang lebih tinggi. Sementara itu, *Leverage* digunakan untuk mengendalikan pengaruh struktur pendanaan perusahaan, karena perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi berpotensi mempunyai kebutuhan transparansi yang lebih besar pada kreditur dan investor.

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh *Board Size* terhadap *Environmental Disclosure*

Kapasitas pengawasan di dalam sebuah perusahaan secara logis sangat bergantung pada jumlah anggota dewan yang bertugas. Dalam perusahaan sektor energi yang aktivitas operasionalnya mempunyai risiko lingkungan yang tinggi, dewan yang berukuran kecil akan kesulitan untuk memantau seluruh aspek kinerja perusahaan secara menyeluruh. Sebaliknya, ukuran dewan yang lebih besar memberi peluang terdapatnya

variasi keahlian, sudut pandang, dan pembagian tugas yang lebih proporsional (Nisa & Wahyuningrum, 2025). Keberagaman dan kapasitas kolektif ini membuat dewan lebih tanggap dan kritis terhadap isu-isu non-finansial seperti dampak lingkungan, sehingga mereka akan mendesak pihak manajemen untuk memberikan pelaporan yang lebih transparan kepada publik.

Secara teoretis, *Agency theory* memandang dewan komisaris sebagai mekanisme pengawasan (*monitoring mechanism*) utama untuk membatasi perilaku manajemen (agen) yang sering kali mengejar kepentingan pribadinya (*self-interest*). Manajemen kerap menyembunyikan informasi terkait risiko lingkungan untuk menghindari tekanan publik. Dalam kerangka teori agensi, semakin besar ukuran dewan komisaris (*Board Size*), semakin ketat juga fungsi pengawasan yang berjalan. Pengawasan yang kuat ini akan meminimalkan asimetri informasi dan memaksa agen untuk mematuhi tuntutan transparansi, sehingga biaya keagenan (*agency cost*) dapat ditekan melalui pengungkapan lingkungan yang lebih komprehensif (Amalia *et al.*, 2022).

Argumen bahwa *Board Size* dapat memengaruhi tingkat *Environmental Disclosure* didukung dengan temuan penelitian sejenis. Chouaibi *et al.* (2022) mengungkapkan bahwa *Board Size* berdampak positif dan signifikan kepada *Environmental Disclosure* dan menyatakan bahwa perusahaan dengan jumlah anggota dewan yang lebih besar berpotensi mempunyai tingkat pengungkapan lingkungan yang lebih

tinggi. *Amalia et al.* (2022) menjelaskan bahwa dewan yang lebih besar dapat menyediakan sumber daya pengawasan yang lebih kuat, merepresentasikan kepentingan *stakeholder* yang lebih beragam, juga meningkatkan perhatian perusahaan terhadap isu lingkungan dan energi. Temuan oleh Sari & Fitriani (2023) menunjukkan pula bahwa ukuran dewan yang lebih besar dapat memaksimalkan efektivitas tata kelola dalam mendorong pengungkapan informasi keberlanjutan, termasuk aspek lingkungan.

Berdasarkan argumentasi logis, landasan teori keagenan, serta dukungan penelitian terdahulu yang telah diuraikan, maka perumusan hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

H1: *Board Size* berpengaruh positif terhadap *Environmental Disclosure*.

2.4.2 Pengaruh *Board Independence* terhadap *Environmental Disclosure*

Kemandirian atau independensi dari anggota dewan merupakan kunci utama dalam objektivitas pengambilan keputusan perusahaan. Komisaris independen yang tidak terikat hubungan finansial, keluarga, ataupun struktural dengan pihak manajemen cenderung memiliki objektivitas dan independensi yang lebih tinggi dalam menjalankan fungsi pengawasan. Kondisi tersebut memungkinkan komisaris independen untuk memberikan kritik, koreksi, serta rekomendasi terhadap kebijakan direksi secara lebih tegas dan bebas dari konflik kepentingan (Okoroafor *et al.*, 2026).

Dalam perspektif *Agency Theory*, keberadaan komisaris independen berfungsi sebagai instrumen pengawasan yang netral untuk memastikan manajemen tidak mengambil tindakan yang bersifat oportunistik maupun melampaui batas kewenangannya. Proporsi komisaris independen yang tinggi dapat memperkuat efektivitas tata kelola perusahaan karena mereka memiliki kapasitas untuk mengawasi, mengevaluasi, dan mendisiplinkan tindakan manajemen secara lebih independen (Chouaibi *et al.*, 2022).

Beberapa penelitian terdahulu mendukung hubungan positif antara *Board Independence* dan *Environmental Disclosure*. Penelitian oleh Chouaibi *et al.* (2022) menjelaskan bahwa dewan independen dapat meningkatkan fungsi pengawasan terhadap manajemen dan memastikan perusahaan memberikan pengungkapan informasi lingkungan yang lebih baik. Temuan oleh Okoroafor *et al.* (2026) menegaskan bahwa *independent directors* memiliki peran penting dalam memperkuat akuntabilitas dan mendorong *Sustainability reporting*, khususnya pada perusahaan minyak dan gas yang memiliki risiko lingkungan tinggi. Selain itu, (Ezekiel *et al.* 2024) menjelaskan bahwa direktur independen memiliki posisi yang lebih objektif dalam mengevaluasi risiko lingkungan, termasuk risiko emisi karbon, karena mereka tidak terlibat langsung dalam aktivitas operasional perusahaan.

Berdasarkan argumentasi logis, landasan teori keagenan, dan didukung oleh hasil studi terdahulu yang telah diuraikan, maka perumusan hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

H2: *Board Independence* berpengaruh positif terhadap *Environmental Disclosure*.

2.4.3 Pengaruh *Managerial Ownership* terhadap *Environmental Disclosure*

Managerial Ownership menunjukkan besaran saham perusahaan yang dikuasai oleh pihak manajemen. Manajemen yang memiliki kepemilikan saham dalam perusahaan secara konseptual berpotensi mempunyai tingkat kehati-hatian yang lebih tinggi daripada manajemen yang hanya berperan sebagai pengelola profesional (Putra *et al.*, 2025). Rasa kepemilikan (*sense of belonging*) ini dapat memengaruhi cara manajer dalam menilai risiko dan mengambil keputusan. Kelalaian dalam pengelolaan perusahaan, termasuk pelanggaran atau pencemaran lingkungan, berpotensi menurunkan reputasi perusahaan, melemahkan kepercayaan investor, serta berdampak pada nilai saham (Ning *et al.*, 2024). Oleh karena itu, manajer yang sekaligus pemegang saham akan berinisiatif untuk mengelola risiko lingkungan dengan baik dan secara proaktif mengungkapkannya kepada publik untuk menjaga reputasi dan stabilitas nilai perusahaan di pasar modal.

Berdasarkan landasan *Agency Theory*, kepemilikan saham oleh pihak manajemen (*managerial ownership*) merupakan mekanisme tata kelola yang berfungsi untuk menciptakan penyelarasan kepentingan

(*alignment of interest hypothesis*). Ketika manajer merangkap sebagai pemilik, garis pemisah yang menimbulkan asimetri informasi dan konflik kepentingan antara agen serta prinsipal menjadi memudar (Wei *et al.*, 2024). Manajemen tidak lagi memiliki insentif untuk mengorbankan kepentingan jangka panjang demi keuntungan sesaat. Akibatnya, motivasi untuk menahan atau memanipulasi informasi menurun, dan manajer secara sukarela akan meningkatkan *Environmental Disclosure* untuk memberikan sinyal tata kelola yang unggul kepada pasar.

Secara empiris, konsep penyelarasan kepentingan ini didukung oleh temuan riset sejenis. Wei *et al.* (2024) menjelaskan bahwa ketika manajemen memiliki saham perusahaan, mereka cenderung melihat *Environmental Disclosure* sebagai instrumen untuk mempererat relasi perusahaan dengan para pemangku kepentingan sekaligus memperbaiki reputasi sosial perusahaan. Selain itu, Putra *et al.* (2025) mengungkapkan bahwa *managerial ownership* dapat menambah komitmen terhadap transparansi lingkungan karena manajemen memiliki kepentingan langsung terhadap reputasi dan keberlanjutan perusahaan.

Berdasarkan argumentasi logis, landasan teori keagenan, serta dukungan studi terdahulu yang telah dijabarkan, maka perumusan hipotesis ketiga dalam penelitian ini yakni:

H3: *Managerial Ownership* berpengaruh positif terhadap *Environmental Disclosure*.